

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Paparan Data**

##### **1. Sejarah Desa**

Desa Dapurkejambon merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Jombang. Adapun cerita singkat Desa Dapurkejambon, berawal dari Kerajaan Mojopahit yang dipimpin oleh Raja Brawijaya 1 (Ki Pranggang) dengan seorang utusannya yang ditugaskan untuk menarik hasil bumi pada suatu wilayah (juru mertani) sedang menyelesaikan pekerjaannya yakni babat alas di tanah pekarangan yang ditumbuhi pohon buah jambu yang sangat lebat dan bergerombol gerombol dengan sebutan lain dapurbnys.<sup>25</sup> Hal tersebut yang menjadikan Ki Pranggang menyebutnya sebagai karang kejambu kemudian diubah lagi menjadi karang kejambon. Ki Pranggang memperluas wilayah pertaniannya yang menjadikan munculnya Dusun Dapurno dan Banggle.

Adapun Desa Dapurkejambon dibagi menjadi 3 (dusun), antara lain:

1. Dusun Kejambon
2. Dusun Dapurno
3. Dusun Banggle

Adapun data Kepala Desa yang pernah menjabat di Desa Dapurkejambon dari awal berdiri hingga saat ini, adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Data Kepala Desa Dapurkejambon**

NO	NAMA	MASA JABATAN	KET
1	Sarip	1925 – 1935	
2	Djenal	1935 – 1950	
3	Suwadi	1950 – 1978	
4	Abdullah Satar	1978 – 1998	
5	Sukadiono	1998 – 2007	
6	M. Subbatul Alimi	2007 – sekarang	

Sumber: RPJM Desa Dapurkejambon 2020-2025

## 2. Demografi

Keadaan suatu desa sangat penting untuk dipahami untuk menentukan adanya keterkaitan perencanaan dengan konten pendukung dan kesulitan yang ada, serta untuk memprioritaskan pilihan pembangunan sebagai sarana untuk menggunakan dan menyelesaikan masalah masyarakat.<sup>10</sup>

Desa Dapurkejambon beriklim kemarau dan penghujan, yang memiliki pengaruh terhadap pola tanam yang ada. Luas wilayah Desa Dapurkejambon adalah 825 ha, dengan batas-batas wilayahnya sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Kalikejambon, Desa Dukuhklopo
- b. Sebelah Selatan : Desa Candimulyo, Mojongapit, Sambongdukuh
- c. Sebelah Timur : Desa Kebon Temu
- d. Sebelah Barat : Desa Tambakrejo

---

<sup>10</sup> *Ibid*

Terdapat tiga dusun dalam Desa Dapurkejambon dengan jumlah penduduk 5.300 jiwa atau 1.623 KK, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Laki-laki : 2.636
- b. Perempuan : 2.664
- c. Kepala Keluarga : 1.623

### 3. Keadaan Sosial

Pertanian merupakan sumber pendapatan utama bagi sebagian besar masyarakat Desa Dapurkejambon. Ketersediaan pilihan pekerjaan yang tidak memadai dengan pertumbuhan penduduk, sebagaimana ditunjukkan dalam rencana pembangunan wilayah Kabupaten Jombang, merupakan masalah yang sering muncul dalam kaitannya dengan mata pencaharian masyarakat. Faktor lain yang perlu dikaji dalam pembangunan desa adalah adanya program untuk meningkatkan prospek kerja dengan memperkuat usaha kecil dan memberikan pinjaman sebagai sumber permodalan untuk pengembangan perusahaan, khususnya di bidang perdagangan.<sup>11</sup>

Angka kemiskinan Desa Dapurkejambon yang masih tinggi menuntut kemampuan masyarakat untuk mencari alternatif pilihan yang dapat membantu peningkatan taraf ekonomi

---

<sup>11</sup> *Ibid*

masyarakat. Banyaknya kegiatan CSO di Desa Dapurkejambon, seperti Masjid Pemuda, Karang Taruna, Jamiyah Yasin, Tahlil, PKK Dharma Wanita, Posyandu, dan Kelompok Arisan, merupakan aset desa yang berharga yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat di setiap desa. proses pengembangan.

#### **4. Keadaan Ekonomi**

Sumber daya alam Desa Dapurkejambon sangat bermanfaat baik bagi pembangunan ekonomi maupun sosial budaya. Selain itu, kota ini strategis terletak di koridor transit yang menghubungkan enam desa dan tiga kecamatan, antara lain Desa Kalikejambon, Desa Dukuhclopo, Desa Kebontemu, Desa Mojongapit, Desa Candi Mulyo, dan Desa Tambakrejo.<sup>12</sup>

Adapun Kekayaan desa terdiri dari :

1. Tanah kas desa
2. Bangunan desa yang dikelola desa
3. Lain-lain kekayaan milik desa

#### **Pendapatan Desa**

Setiap tahun anggaran, seluruh jumlah pendapatan desa yang didokumentasikan dalam APBDes. Sumber Pendapatan Desa, menurut Peraturan Desa Dapur Kejambon Nomor 2 Tahun 2020:

---

<sup>12</sup> *Ibid*

1. Sumber Pendapatan Desa
  - a. Pendapatan Asli Desa terdiri dari kekayaan desa, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan pendapatan asli desa lainnya yang sah;
  - b. Bagi hasil Pajak Daerah Kabupaten untuk desa dan sebagian retribusi kabupaten yang diperuntukan bagi desa, yang pembagiannya proporsional untuk masing-masing desa;
  - c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten untuk desa yang pembagiannya dilakukan secara proporsional untuk setiap desa;
  - d. Bantuan keuangan dari Pemerintah (DI), pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah (ADD) dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan;
  - e. Hibah dan hadiah dari pihak ketiga yang tidak mengikat..
2. Bantuan keuangan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dan ditangani melalui kas desa;
3. Sumber pendapatan Desa yang dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak berwenang diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah.

## 5. Visi dan Misi

Visi tersebut merupakan pernyataan luas tentang apa yang diharapkan pada akhir masa pemerintahan desa. Visi Pemerintah Desa dapat juga diartikan sebagai pernyataan tentang kondisi ideal yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Pemerintah Desa dan pelaku pembangunan lainnya menggunakan visi sebagai alat untuk memahami, menganalisis, dan meramalkan keadaan desa yang diprediksi. “Terwujudnya Masyarakat Desa Dapurkejambon yang Sejahtera dan Mandiri” adalah cita-cita Desa Dapurkejambon. Berikut ini adalah beberapa arti dari visi tersebut:

1. Sejahtera: Suatu masyarakat dikatakan sejahtera jika kondisi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi masyarakat tersebut semuanya terpenuhi pada tingkat kehidupan yang wajar.
2. Mandiri: Suatu masyarakat dianggap mandiri dalam menopang pembavngunan desa dan mampu menyediakan lapangan pekerjaan dengan memanfaatkan Sumber Daya Manusia yang ada.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi. Adapun misi Desa Dapurkejambon yang digunakan dalam mewujudkan visinya adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih, transparan, dan profesional di Desa Dapurkejambon.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan menanamkan karakter dan daya saing di dalamnya.
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat di desa
4. Meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat di bidang kependudukan, kesehatan, dan pendidikan.
5. Meningkatkan pemberdayaan UKM desa
6. Penguatan pembangunan pertanian, peternakan, dan perikanan untuk meningkatkan ketahanan pangan
7. Peningkatan fasilitas kesehatan, pencegahan penyakit menular, dan pengurangan stunting menjadi prioritas.
8. Investasi pada Badan Usaha Milik Desa (BUM Des)
9. Distribusi infrastruktur yang merata dan sesuai dengan kewenangan Desa.

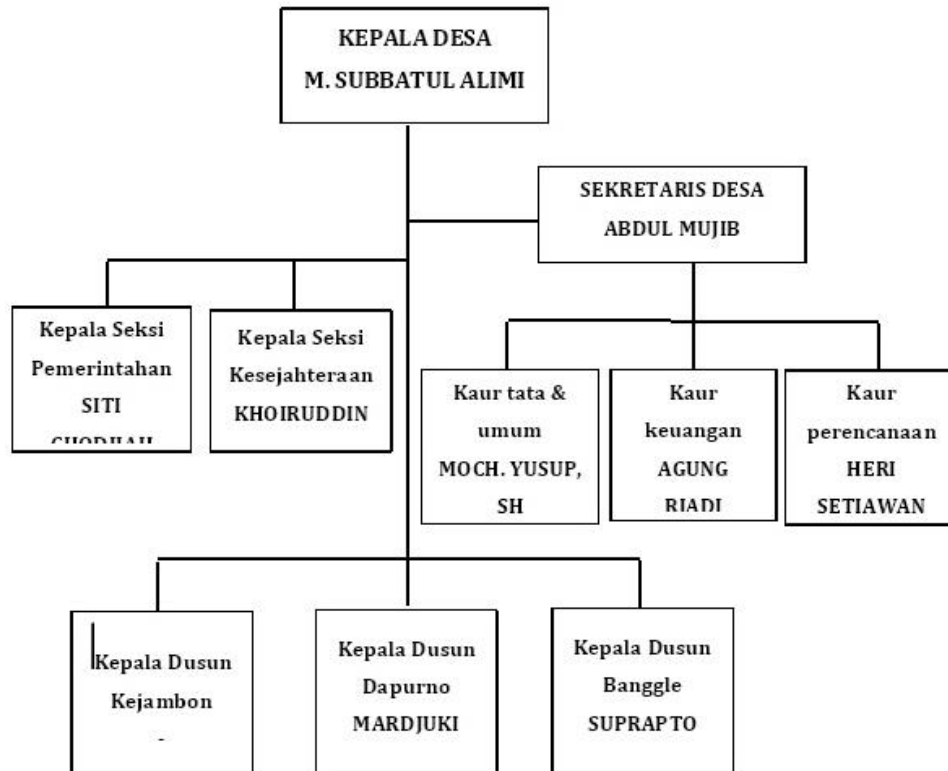
## **6. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Dapurkejambon**

Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan adalah tiga jenis lembaga Desa yang berperan dalam pemerintahan desa, menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, yang berfungsi sebagai administrasi komponen desa. Kepala desa bertanggung jawab atas urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan penyelenggara pemerintahan yang mencontohkan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Peran Badan Permusyawaratan Desa adalah bekerja sama dengan kepala daerah untuk menyusun peraturan desa, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggota BPD adalah penduduk desa yang bersangkutan, dengan perwakilan daerah dipilih melalui debat.



**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Dapurkejambon**



*Sumber: Pemerintahan Desa Dapurkejambon, 2021*

## **B. Temuan Penelitian**

### **1. Pengelolaan dan Kinerja Keuangan Desa**

Keuangan desa merupakan bagian dari hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai secara finansial, baik berupa uang maupun barang. Bentuk keuangan desa berupa Laporan APBDes dan Laporan Realisasi APBDes. Pengelolaan keuangan desa harus mengikuti pedoman dan prinsip-prinsip yang telah ditentukan agar keuangan desa dapat dipergunakan secara ekonomis, efisien, efektif, dan berkeadilan.<sup>13</sup>

Maksud dari secara ekonomis adalah dalam mengelola keuangan tersebut menghasilkan perbandingan terbaik antara input dengan nilai inpu. Secara efisien berarti dalam mengelola keuangan tersebut menghasilkan perbandingan antara input dengan output. Secara efektif berarti dalam mengelola keuangan tersebut harus dapat tercapai tujuan yang ditetapkan. Sedangkan secara berkeadilan berarti dalam mengelola keuangan tersebut harus memenuhi standar keadilan masyarakat. Perlu adanya pemahaman mengenai pengelolaan keuangan desa agar dapat diketahui seberapa jauh kinerja yang dilakukan pengelola keuangan desa dalam menjalankan keuangan desa.

---

<sup>13</sup>Chabib Soleh, Heru Rochansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, (Bandung: Fokusmedia, 2014), hal.3-7.

Peneliti melakukan wawancara mengenai pengelolaan keuangan desa (APBDes) Dapurkejambon. Menurut Bapak Subbatul Alimi selaku Kepala Desa:

“APBDes Desa Dapurkejambon pengelolaannya dilakukan secara musyawarah bersama agar lebih transparan. Wujud dari adanya transparansi tersebut adalah berupa penayangan banner mengenai Realisasi Anggaran Desa dan juga dapat diperoleh secara online.”<sup>14</sup>

Sedangkan menurut Bapak Abdul Mujib selaku Sekretaris Desa:

“Selaku koordinator penyusun anggaran pengelolaan APBDes Desa Dapurkejambon pasti dilaksanakan sesuai dengan perencanaan satu tahun periode, kecuali jika ada hal-hal yang bersifat krusial atas perintah aturan maka akan dilakukan revisi.”<sup>15</sup>

Hal tersebut diperjelas oleh Bapak Agung Riadi selaku Bendahara Desa:

“Pengelolaan APBDes Desa Dapurkejambon dilakukan dengan membuat daftar belanja yang sudah dilakukan terlebih dahulu, lalu diserahkan kepada pelaksana kegiatan untuk disusun sebagai surat permintaan pembayaran (SPP) baru diserahkan ke Bendahara Desa. Selanjutnya diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa. Jika sudah maka dana bisa dicairkan untuk pelaporan bukti cukup berupa nota dan kwitansi, kecuali untuk Belanja Modal harus ada foto atau dokumentasinya”<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Wawancara, Bapak Subbatul Alimi selaku Kepala Desa pada 17 Februari 2022

<sup>15</sup> Wawancara, Bapak Abdul Mujib selaku Sekretaris Desa pada 17 Februari 2022

<sup>16</sup> Wawancara, Bapak Agung Riadi selaku Bendahara Desa pada 21 Februari 2022

Wawancara selanjutnya mengenai Apakah pengelolaan APBDes Desa Dapurkejambon sudah sesuai yang diharapkan.

Menurut Bapak Subbatul Alimi selaku Kepala Desa:

“Pemerintah Desa pengelolaannya harus sesuai dengan program yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kemudian masyarakat juga harus menyesuaikan kemampuan Pemerintah Desa.”<sup>17</sup>

Penjelasan tersebut ditambah oleh Bapak Abdul Mujib selaku Sekretaris Desa:

“Kepuasan, ketercapaian dan pemerataan itukan tujuan dari program Pemerintahan Desa, tetapi karena kondisi keuangan di Desa Dapurkejambon ini yang hanya menunggu transfer dari Pemerintah Daerah jadi itu yang dikelola secara berkelanjutan dengan mengutamakan transparansi agar masyarakat tahu meskipun masyarakat mungkin tidak mau tahu.”<sup>18</sup>

Bapak Agung Riadi selaku Bendahara Desa berpendapat:

“Belum, dikarenakan adanya kendala yang rata-rata faktor SDM-nya. Jadi perlu adanya penekanan berupa peraturan jika ingin mencairkan dana diharuskan menunjukkan SPJ tahun sebelumnya.”<sup>19</sup>

Tambahan oleh Bapak Hj. Ali Mahrus selaku BPD:

“Dalam perencanaan konsep dari pemdes-BPD sebagai penyelenggara musdes menjembatani warga (toga-tomas-RT/RW) mensikapi rencana yang ada di Apbdes sesuai/tidak keputusan tertinggi ada di musdes. Kalau kendala Ada, terutama semester ke 2 2019 dan 2020 beberapa pos anggaran mengalami refocusing anggaran karena dialihkan pada percepatan penanganan pandemic covid 19.seperti anggaran untuk pembangunan fisik harus dicancel dialihkan pada BLT pada warga berdampak covid 19”<sup>20</sup>

<sup>17</sup> Wawancara, Bapak Subbatul Alimi selaku Kepala Desa pada 17 Februari 2022

<sup>18</sup> Wawancara, Bapak Abdul Mujib selaku Sekretaris Desa pada 17 Februari 2022

<sup>19</sup> Wawancara, Bapak Agung Riadi selaku Bendahara Desa pada 21 Februari 2022

<sup>20</sup> Wawancara, Bapak Ali Mahrus selaku BPD pada 20 April 2022

Ibu Nita Rahmawati selaku masyarakat Desa menambahkan pendapatnya:

"Masyarakat itu kan berperan dalam APBDes hanya sebagai pengawas itupun melalui BPD mbak. Jadi masyarakat itu tahunya Realisasinya APBDes yang biasanya dipajang dibanner-banner itu. Tapi ya memang itu kan mbak bentuk transparansinya keuangan desa." <sup>21</sup>

Penilaian kinerja keuangan desa sangat penting untuk dilakukan. Tujuan adanya penilaian tersebut dimaksudkan agar dapat mengevaluasi pelaksanaan keuangan dimasa lalu untuk masa mendatang, serta agar dapat dijadikan bahan pengambilan keputusan yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, wawancara selanjutnya mengenai Apakah Desa Dapurkejambon sudah pernah melakukan penilaiiaan kinerja keuangan, jika sudah bagaimana bentuk dari penilaian kinerja keuangan tersebut.

Menurut Bapak Subbatul Alimi :

"Ada, Bendahara Desa biasanya melakukan pelaporan kepada Kepala Desa setiap dilakukannya Belanja Desa Bulanan." <sup>22</sup>

Hal ini senada dengan pendapat Bapak Abdul Mujib:

"Ada, setiap 3 (tiga) bulan sekali Bendahara Desa laporan kepada Kepala Desa". <sup>23</sup>

Ditambah oleh Bapak Agung Riadi:

"Laporan kepada Kepala Desa kemudian biasanya diaudit oleh inspektorat dengan menggunakan dua sistem yaitu definitif dan panjar." <sup>24</sup>

<sup>21</sup> Wawancara, Ibu Nita Rahmawati selaku masyarakat Desa pada 20 April 2022

<sup>22</sup> Wawancara, Bapak Subbatul Alimi selaku Kepala Desa pada 21 Februari 2022

<sup>23</sup> Wawancara, Bapak Abdul Mujib selaku Sekretaris Desa pada 21 Februari 2022

<sup>24</sup> Wawancara, Bapak Agung Riadi selaku Bendahara Desa pada 21 Februari 2022

Bapak H.Ali Mahrus selaku BPD menambahkan:

"Untuk penilaian kinerja keuangan bukan ranah BPD. BPD bukan menilai tapi melakukan pengawasan sesuai tupoksi"<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Wawancara, Bapak Ali Mahrus selaku BPD pada 20 April 2022

**Tabel 4.2**  
**Triangulasi: Pengelolaan dan Kinerja Keuangan Desa**

Pertanyaan	Hasil Wawancara			Kesimpulan
	Informan 1	Informan 2	Informan 3	
Bagaimana pengelolaan keuangan Desa Dapurkejambon?	<p>Desa Dapurkejambon pengelolaan dilakukan secara musyawarah bersama agar lebih transparan. Wujud dari adanya transparansi tersebut adalah berupa penayangan banner mengenai Realisasi Anggaran Desa dan juga dapat diperoleh secara online.<sup>26</sup></p>	<p>Selaku koordinator penyusun anggaran pengelolaan APBDes Desa Dapurkejambon pasti dilaksanakan sesuai dengan perencanaan satu tahun periode, kecuali jika ada hal-hal yang bersifat krusial atas perintah aturan maka akan dilakukan revisi.<sup>27</sup></p>	<p>Desa APBDes Dapurkejambon dilakukan dengan membuat daftar belanja yang sudah dilakukan terlebih dahulu, lalu diserahkan kepada pelaksana kegiatan untuk disusun sebagai surat permintaan pembayaran (SPP) baru diserahkan ke Bendahara Desa. Selanjutnya diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa. Jika sudah maka dana bisa dicairkan untuk pelaporan bukti cukup berupa nota dan kwitansi, kecuali untuk Belanja Modal harus ada foto atau dokumentasinya<sup>28</sup></p>	<p>Pengelolaan keuangan di Desa Dapurkejambon dilakukan dengan musyawarah bersama dengan merancang perencanaan satu tahun periode setiap akhir tahun</p>
Apakah pengelolaan keuangan Desa Dapurkejambon sudah sesuai dengan yang diharapkan?	<p>Informan 1 Pemerintah Desa harus sesuai dengan program yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kemudian masyarakat juga harus menyesuaikan kemampuan Pemerintah Desa.</p>	<p>Informan 2 Kepuasan, ketercapaian dan pemerataan itu kan tujuan dari program Pemerintahan Desa, tetapi karena kondisi keuangan di Desa Dapurkejambon ini yang hanya menunggu transfer dari Pemerintah Daerah jadi itu yang dikelola secara berkelanjutan dengan mengutamakan</p>	<p>Informan 3 Dalam perencanaan konsep dari pemdes-BPD sebagai penyelenggara musdes menjembatani warga (toga tomas-RT/RW) mengisi rencana yang ada di Apbdes sesuai/tidak keputusan tertinggi ada di musdes. Kalau kendala Ada, terutama semester ke 2 2019 dan 2020 beberapa pos anggaran mengalami</p>	<p>Informan 4 Belum. Karena setiap perencanaan pasti ada kendalanya tersendiri, baik disengaja maupun tidak teduga. Tetapi pemerintahan desa tetap harus melaksanakan pengelolaannya sesuai dengan yang direncanakan dengan menyesuaikan</p>

<sup>26</sup> Wawancara, Bapak Subbatul Alimi selaku Kepala Desa pada 21 Februari 2022

<sup>27</sup> Wawancara, Bapak Abdul Mujib selaku Sekretaris Desa pada 21 Februari 2022

<sup>28</sup> Wawancara, Bapak Agung Riadi selaku Bendahara Desa pada 21 Februari 2022

<p>Apakah Desa Dapurkejambon sudah pernah melakukan penilaian kinerja keuangan, jika sudah bagaimana bentuk dari penilaian kinerja keuangan tersebut?</p>	<p><b>Informan 3</b></p> <p>Belum, dikarenakan adanya kendala yang rata-rata faktor SDM-nya. Jadi perlu adanya penekanan berupa peraturan jika ingin mencairkan dana diharuskan menunjukkan SPJ seafvssffsgewrawwwsbelumnya</p>	<p>transparansi agar masyarakat tahu meskipun masyarakat mungkin tidak mau tahu</p> <p><b>Informan 5</b></p> <p>Masyarakat itu kan berperan dalam APBDes hanya sebagai pengawas itupun melalui BPD mbak. Jadi masyarakat itu tahunya Realisasinya APBDes yang biasanya dipajang dibanner-banner itu. Tapi ya memang itu kan mbak bentuk transparansinya keuangan desa<sup>30</sup></p>	<p>refocusing anggaran karena dialihkan pada percepatan penanganan pandemic covid 19.seperti anggaran untuk pembangunan fisik harus dicancel dialihkan pada BLT pada warga berdampak covid 19<sup>29</sup></p>	<p>kemampuannya.</p>
<p></p>	<p><b>Informan 1</b></p> <p>Ada, Bendahara Desa biasanya melakukan pelaporan kepada Kepala Desa setiap dilakukannya Belanja Desa Bulanan</p> <p><b>Informan 3</b></p> <p>Laporan kepada Kepala Desa kemudian biasanya diaudit oleh inspektorat dengan menggunakan dua sistem yaitu definitif dan panjar.”</p>	<p><b>Informan 2</b></p> <p>Ada, setiap 3 (tiga) bulan sekali Bendahara Desa laporan kepada Kepala Desa</p> <p><b>Informan 4</b></p> <p>Untuk penilaian kinerja keuangan bukan ranah BPD. BPD bukan menilai tapi melakukan pengawasan sesuai tupoksi</p>	<p></p>	<p>Terdapat penilaian kinerja keuangan desa melalui kepala desa kemudian diserahkan kepada inspektorat untuk dilakukan pengauditan. Dalam hal penilaian kinerja BPD tidak memiliki kewenangan, hanya sebatas mengawasi bukan menilai.</p>

<sup>29</sup> Wawancara, Bapak Ali Mahrus selaku BPD pada 20 April 2022

<sup>30</sup> Wawancara, Ibu Nita Rahmawati selaku masyarakat Desa pada 20 April 2022



## 2. Penilaian Pendekatan Nilai Uang (*Value For Money*)

Penelitian ini menggunakan data penelitian dari Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Desa Kitchenkejambon periode anggaran 2018–2020 untuk mengevaluasi kinerja keuangan Desa Dapurejambon. Evaluasi didasarkan pada metode Value for Money, yang mempertimbangkan tiga faktor: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Berikut rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Desa Dapurkejambon tahun periode 2018-2020:

**Tabel 4.2**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Desa Dapurkejambon**  
**Tahun 2018-2020**

No	Pendapatan	Tahun	Anggaran	Realisasi	Selisih
1.	Pendapatan	2018	215.875.285,00	215.875.285,00	0,00
	Asli Desa	2019	215.870.000,00	215.870.000,00	0,00
		2020	291.370.000,00	288.500.000,00	2.870.000,00
2.	Pendapatan Transfer	2018	1.646.365.664,00	1.646.365.664,00	0,00
		2019	1.573.768.000,00	1.573.768.000,00	0,00
		2020	1.570.387.000,00	1.570.386.984,00	16,00
3	Pendapatan Lain-lain	2018	3.215.000,00	2.869.038,00	345.962,00
		2019	32.775.400,00	33.988.682,00	(1.213.282,00)
		2020	5.000.000,00	6.854.640,00	(1.854.640,00)

Sumber: Pemerintahan Desa Dapurkejambon, 2021

Pendapatan Asli Desa Tahun 2018-2020 bervariasi, sesuai tabel 4.3 Kekhususan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Desa Dapurkejambon. Pada tahun 2018, anggaran sebesar Rp 215.875.285.00 terpenuhi, dan anggaran sebesar Rp 215.875.285.00 terpenuhi, tahun 2019 mengalami penurunan yaitu

sebesar Rp 215.870.000,00 terealisasi sesuai anggaran sebesar Rp 215.870.000,00. Tahun 2020 anggaran mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp 291.370.000,00 namun realisasinya lebih kecil yaitu Rp 288.500.000,00 sehingga menyebabkan adanya selisih sebesar Rp 2.870.000,00. Pemerintah desa dapat menggali potensi masyarakat sehingga anggaran pendapatan asli desa dapat ditingkatkan.

Pendapatan transfer desa tahun 2018 sebesar Rp 1.646.365.664,00 terealisasi sesuai anggaran sebesar Rp 1.646.365.664,00. Tahun 2019 sebesar Rp 1.573.768.000,00 terealisasi sesuai anggaran sebesar Rp 1.573.768.000 dan tahun 2020 Rp 1.570.387.000 namun terealisasi sebesar Rp 1.570.386.984 menyebabkan adanya selisih sebesar 16,00.

**Pendapatan lain-lain juga mengalami fluktuasi pada tahun 2018 sebesar Rp 3.215.000 terealisasi sebesar Rp 2.869.038. Tahun 2019 mengalami kenaikan dikarenakan terdapat koreksi kesalahan Belanja pada tahun-tahun sebelumnya sehingga anggarannya sebesar Rp 32.775.400,00 dan terealisasi sebesar Rp 33.988.682,00 terdapat selisih sebesar Rp 1.213.282,00. Kemudian tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp 5.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 6.854.640,00 menyebabkan selisih sebesar Rp 1.854.640,00.**

**Tabel 4.3**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Desa Dapurkejambon**  
**Tahun 2018-2019**

No	Belanja	Tahun	Anggaran	Realisasi	Selisih
1.	Belanja Pegawai	2018	452.616.000,00	452.616.000,00	0,00
		2019	473.160.000,00	473.160.000,00	0,00
2.	Belanja Barang & Jasa	2018	612.508.246,85	608.938.479,00	3.569.767,85
		2019	579.935.905,85	562.520.867,00	17.415.038,85
3.	Belanja Modal	2018	1.606.569.187,00	726.569.000,00	880.000.187,00
		2019	782.541.487,00	662.710.000,00	119.831.487,00

Sumber: Pemerintahan Desa Dapurkejambon, 2021

Berdasarkan tabel 4.4 rincian anggaran dan realisasi belanja desa Dapurkejambon tahun 2018 dan 2019, anggaran belanja mengalami fluktuasi. Tahun 2018 dan 2019 anggaran belanja pegawai terealisasi sesuai anggaran sebesar Rp 452.616.000,00 dan Rp 473.160.000,00. Kemudian anggaran belanja barang dan jasa tahun 2018 sebesar Rp 612.508.246,85 terealisasi sebesar 608.938.479,00 sehingga menyebabkan selisih sebesar Rp 3.569.767,85. Sedangkan tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp 579.935.905,85 terealisasi sebesar Rp 562.520.867,00 dengan selisih Rp 17.415.038,85. Tahun 2018 anggaran belanja Modal sebesar Rp 1.606.569.187,00 terealisasi sebesar Rp 726.569.000,00 menyebabkan selisih sebesar Rp 880.000.187,00. Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp 782.541.487,00.

**Tabel 4.4**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Desa Dapurkejambon**  
**Tahun 2020**

No	Belanja	Anggaran	Realisasi	Selisih
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	722.579.320,85	678.611.472,02	43.967.848,83
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	501.632.478,00	418.276.000,00	83.356.487,00
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	50.250.000,00	39.600.000,00	10.650.000,00
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	33.555.000,00	6.465.000,00	27.090.000,00
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	697.200.000,00	675.200.000,00	22.000.000,00

*Sumber: Pemerintahan Desa Dapurkejambon, 2021*

Berdasarkan tabel 4.5 rincian anggaran belanja Desa Dapurkejambon tahun 2020 terdapat 5 bidang dikarenakan adanya keharusan mengisi anggaran tidak terduga yaitu penanganan covid-19 yang masuk dalam Anggaran Penanggulangan Bencana, Darurat Mendesak Desa. Pada tahun tersebut, realisasi di masing-masing sektor lebih rendah dari anggaran, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Dapur Kejambon mengikuti anggaran dalam merealisasikan belanja untuk masing-masing sektor.

### C. Analisis Penilaian Nilai Uang (*Value for Money*)

#### 1. Penilaian Ekonomi

Elemen ekonomi merupakan elemen yang berhubungan dengan konsep hemat yang mencakup pengelolaan secara tepat tanpa ada pemborosan. Jika biaya yang digunakan adalah sedikit maka aktivitas pengelolaan tersebut dianggap ekonomis.

$$\text{Ekonomi} = \frac{\text{Anggaran Belanja}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Adapun ketentuan kinerja keuangan berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri jika dinilai dengan elemen ekonomi:

- a. 100% ke atas berarti Sangat Ekonomis
- b. 90% - 100% berarti Ekonomis
- c. 80% - 90% berarti Cukup Ekonomis
- d. 60% - 80% berarti Kurang Ekonomis
- e. Kurang dari 60% berarti Tidak Ekonomis

Penilaian kinerja keuangan pemerintahan Desa Dapurkejambon Tahun 2018-2020 jika dinilai dengan elemen ekonomi adalah sebagai berikut:

- a. Tahun 2018

$$\begin{aligned} \text{Ekonomi} &= \frac{\text{Anggaran Belanja}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp } 2.671.693.433,8}{\text{Rp } 1.788.123.479,00} \times 100\% \\ &= 149,41 \% \end{aligned}$$

b. Tahun 2019

$$\text{Ekonomi} = \frac{\text{Anggaran Belanja}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp } 1.836.637.392,85}{\text{Rp } 1.698.390.867,00} \times 100\%$$

$$= 108,13 \%$$

c. Tahun 2020

$$\text{Ekonomi} = \frac{\text{Anggaran Belanja}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp } 2.005.216.807,85}{\text{Rp } 1.818.152.472,02} \times 100\%$$

$$= 110,28 \%$$

**Tabel 4.5**  
**Hasil Presentase Penilaian Ekonomi**  
**Pemerintahan Desa Dapurkejambon Tahun 2018-2020**

Tahun	Hasil Presentase (%)
2018	149,41 %
2019	108,13 %
2020	110,28 %

Sumber: diolah peneliti, 2022

Berdasarkan Tabel 4.6 tersebut, penilaian ekonomi Desa Dapurkejambon mengalami fluktuasi dari tahun 2018-2020. Tahun 2018-2019 mengalami penurunan sebesar 41,28% dari 149,41% menjadi 108,13%. Penurunan ini disebabkan target anggaran sebesar Rp 1.835.637.392,85 yang tidak jauh dari realisasi belanja tahun 2019 sebesar Rp 1.698.390.867,00 yang disebabkan oleh tidak adanya pendapatan hibah dan sumbangan

pihak ketiga yang menjadikan tidak terlaksananya pembiayaan pembangunan fisik di tahun 2019. Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 2,15% yang awalnya 108,13% menjadi 110,28% hal tersebut dikarenakan pada tahun 2020 terdapat penambahan anggaran pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa untuk menangani pandemi covid-19.

Persentase penilaian ekonomi pada Pemerintah Desa Dapur Kejambon Tahun 2018-2020 dinyatakan sangat ekonomis karena sudah di atas 100 persen, seperti terlihat pada tabel di atas. serta dikarenakan Desa Dapurkejambon telah mampu mengelola anggaran belanja dengan baik meskipun terdapat kendala pada tahun 2019 di mana tidak turunnya pendapatan hibah dan sumbangan orang ketiga yang dianggarkan untuk pembangunan fisik dan pada tahun 2020 terdapat kendala adanya *refocusing* anggaran belanja yang seharusnya digunakan untuk pembangunan fisik dialihkan untuk menangani pandemi covid-19.

## 2. Penilaian Efisiensi

Elemen Efisiensi merupakan membandingkan nilai output dengan nilai input. Penilaian kinerja keuangan dengan elemen efisiensi pada pemerintahan desa dapat dilakukan dengan membandingkan antara jumlah Realisasi Anggaran Belanja dengan jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Realisasi Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Adapun ketentuan kinerja keuangan berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri jika dinilai dengan elemen efisiensi:

- a. 100% ke atas berarti Tidak Efisien
- b. 90% - 100% berarti Kurang Efisien
- c. 80% - 90% berarti Cukup Efisien
- d. 60% - 80% berarti Efisien
- e. Kurang dari 100% berarti Sangat Efisien

Penilaian kinerja keuangan pemerintahan Desa Dapurkejambon Tahun 2018-2020 jika dinilai dengan elemen efisiensi adalah sebagai berikut:

- a. Tahun 2018

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Realisasi Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp } 1.788.123.479,00}{\text{Rp } 1.865.109.987,00} \times 100\%$$

$$= 95,87\%$$



b. Tahun 2019

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi} &= \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Realisasi Anggaran Pendapatan}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp } 1.698.390.815,00}{\text{Rp } 1.823.626.682,00} \times 100\% \\ &= 93,13 \% \end{aligned}$$

c. Tahun 2020

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi} &= \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Realisasi Anggaran Pendapatan}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp } 1.818.152.472,02}{\text{Rp } 1.865.741.624,10} \times 100\% \\ &= 97,44 \% \end{aligned}$$

**Tabel 4.6**  
**Hasil Presentase Penilaian Efisiensi**  
**Pemerintahan Desa Dapurkejambon Tahun 2018-2020**

Tahun	Hasil Presentase (%)
2018	95,87%
2019	93,13%
2020	97,44%

Sumber: diolah peneliti, 2022

Berdasarkan Tabel 4.7 tersebut, penilaian efisiensi Desa Dapurkejambon mengalami fluktuasi dari tahun 2018-2020. Tahun 2018-2019 mengalami penurunan sebesar 2,74% dari 95,87% menjadi 93,13%. Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 4,31% yang awalnya 93,13% menjadi 97,44%. Pada tabel di atas menunjukkan adanya presentase penilaian efisiensi pada Pemerintah Desa Dapurkejambon tahun 2018-2020 dikatakan Kurang Efisien karena berturut-turut menunjukkan presentase lebih dari 90%. Dikatakan kurang efisien disebabkan

juga adanya pengalihan penggunaan anggaran lainnya seperti pada tahun 2019 dan 2020. Di mana tahun 2019 untuk pembangunan fisik yang seharusnya menggunakan anggaran pendapatan hibah dan sumbangan pihak ketiga dari pemerintah pusat tetapi malah menggunakan anggaran pendapatan lain-lain. Kemudian di tahun 2020 dikatakan kurang efisien karena pemerintah desa juga melakukan *refocusing* anggaran yang dialihkan untuk penyaluran BLT pandemi covid-19.

### 3. Penilaian Efektivitas

Elemen efektivitas merupakan penilaian yang berkaitan dengan pencapaian hasil atau output yang dicapai sesuai dengan yang ditentukan atau tidak. Dapat dikatakan efektif jika suatu organisasi telah mencapai apa yang dijadikan tujuan.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Adapun ketentuan kinerja keuangan berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri jika dinilai dengan elemen efektivitas:

- a. 100% - ke atas berarti Sangat Efektif
- b. 90% - 100% berarti Efektif
- c. 80% - 90% berarti Cukup Efektif
- d. 60% - 80% berarti Kurang Efektif
- e. Kurang dari 60% berarti Tidak Efektif

Penilaian kinerja keuangan pemerintahan Desa Dapurkejambon Tahun 2018-2020 jika dinilai dengan elemen Efektivitas adalah sebagai berikut:

a. Tahun 2018

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi Anggaran Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp } 1.865.109.987,00}{\text{Rp } 2.785.455.949,00} \times 100\% \\ &= 66,95\% \end{aligned}$$

b. Tahun 2019

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi Anggaran Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp } 1.823.626.682,00}{\text{Rp } 1.822.413.400,00} \times 100\% \\ &= 100,06\% \end{aligned}$$

c. Tahun 2020

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi Anggaran Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp } 1.865.741.624,10}{\text{Rp } 1.866.757.000,00} \times 100\% \\ &= 99,94\% \end{aligned}$$

**Tabel 4.7**  
**Hasil Presentase Penilaian Efektivitas**  
**Pemerintahan Desa Dapurkejambon Tahun 2018-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Hasil Presentase (%)</b>
2018	66,95%
2019	100,06%
2020	99,94%

*Sumber: diolah peneliti, 2022*

Berdasarkan Tabel 4.8 tersebut, penilaian efektivitas Desa Dapurkejambon mengalami fluktuasi dari tahun 2018-2020. Tahun 2018-2019 mengalami kenaikan sebesar 33,11% dari 66,95% menjadi 100,06%. Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,12% yang awalnya 100,06% menjadi 99,94%. Pada tabel di atas menunjukkan adanya presentase penilaian efektivitas pada Pemerintah Desa Dapurkejambon tahun 2018 dikatakan kurang efektif karena berada pada presentase 60% - 80%. Dikarenakan juga pada tahun tersebut realisasi anggaran pendapatannya kurang sesuai dengan anggaran yang direncanakan, terdapat pada anggaran pendapatan lain-lain desa yang sah. Di mana jumlah realisasinya lebih kecil daripada anggaran yang direncanakan.

Tahun 2019 dikatakan Sangat Efektif karena berada pada presentase lebih dari 100%. Dikarenakan juga pada tahun tersebut pemerintah desa mampu merealisasikan anggarannya sesuai dengan yang direncanakan. Meskipun terdapat selisih antara anggaran dan realisasi pada pendapatan lain-lain yang

menunjukkan jumlah realisasinya lebih besar daripada anggaran yang direncanakan.

Sedangkan di Tahun 2020 dikatakan Efektif karena berada pada presentase 90% - 100%. Dikarenakan juga pada tahun tersebut pemerintah desa mampu merealisasikan anggarannya sesuai dengan yang direncanakan.

**Tabel 4.8**  
**Hasil Penilaian Pendekatan Nilai Uang**  
**Pemerintahan Desa Dapurkejambon Tahun 2018-2020**

<b>Penilaian Nilai Uang (<i>Value For Money</i>)</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Ekonomi</b>	149,41%	108,13%	110,28%
<b>Kriteria</b>	<b>Sangat Ekonomis</b>	<b>Sangat Ekonomis</b>	<b>Sangat Ekonomis</b>
<b>Efisiensi</b>	95,87%	93,13%	97,44%
<b>Kriteria</b>	<b>Kurang Efisien</b>	<b>Kurang Efisien</b>	<b>Kurang Efisien</b>
<b>Efektivitas</b>	66,95%	100,06%	99,94%
<b>Kriteria</b>	<b>Kurang efektif</b>	<b>Sangat Efektif</b>	<b>Efektif</b>

*Sumber: diolah peneliti, 2022*

Tabel 4.9 di atas menunjukkan hasil penilaian kinerja keuangan dengan Pendekatan Nilai Uang (*Value For Money*) Pemerintahan Desa Dapurkejambon untuk 3 (tiga) tahun anggaran yakni 2018-2020 yang dinilai berdasarkan pada Laporan Reaisasi APBDes. Penilaian value for money yang dilaksanakan terdiri dari unsur ekonomi yang membandingkan anggaran belanja dengan pengeluaran yang sebenarnya,

unsur efisiensi yang membandingkan pengeluaran yang sebenarnya dengan pendapatan desa yang sebenarnya, dan unsur efektivitas yang membandingkan pendapatan yang sebenarnya dengan pendapatan yang dianggarkan. Evaluasi dilakukan sesuai dengan apa yang didasarkan pada teori.

Berdasarkan penilaian ekonomi dapat dikatakan kinerja keuangan Desa Dapurkejambon di tiga tahun anggaran berturut-turut adalah Sangat Ekonomis. Hal ini dikarenakan presentase yang dihasilkan berturut-turut berada pada kriteria lebih dari 100%. Untuk penilaian efisiensi yang telah dilakukan dapat dikatakan Desa Dapurkejambon pada tiga tahun anggaran berturut-turut dikatakan Kurang Efisien. Hal ini dikarenakan presentase yang dihasilkan menunjukkan lebih dari 90%.

Sedangkan berdasarkan penilaian efektivitas yang telah dilakukan pada kinerja keuangan Desa Dapurkejambon mengalami fluktuasi. Di tahun 2018 dikatakan Kurang Efektif karena persentasenya berada pada kriteria 60% - 80%. Tahun 2019 mengalami kenaikan dan dikatakan **Sangat Efektif karena berada pada presentase lebih dari 100%**. Sedangkan di Tahun 2020 mengalami penurunan dikatakan Efektif karena berada pada presentase 90% - 100%.